BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan kerja praktek yang penulis lakukan di Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi Bagian Keuangan Sekertariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi, penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Prosedur penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Fungsioanal Pemerintahan Kota Cimahi telah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No 59 tahun 2007, tetapi kenyataannya hingga saat ini SPJ belum rampung semua sehingga bagian keuangan sendiri belum bisa mengirimkan full data pencairan ke pusat
2. Dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam Prosedur penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Fungsioanal Pemerintah Kota Cimahi telah sesuai dengan permendagri no 13 tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, tetapi ada dokumen yang belum lengkap.

4.2 Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Fungsioanal di Pemerintah Kota Cimahi:

1. Mengingatkan kepada SKPD untuk lebih tepat waktu dan dilengkapi dengan bukti yang sah dalam menyerahkan SPJ pengeluaran Fungsioanalnya ke

PPKD selaku BUD dan dikhawatirkan di BPK akan berbuntut panjang sehingga nantinya bisa kena pada dinas yang bersangkutan.

2. Menyempurnakan lagi dokumen-dokumen agar penyusunan SPJ pengeluaran Fungsioanal dapat segera disusun.